EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BURSA INOVASI DESA (BID) DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI PADA BURSA INOVASI DESA *CLUSTER* VI TAHUN 2019)

Nidiar Febrian Vidyananda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Diardd444@gmail.com

Galih Wahyu pradana, S.AP., M. Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncuran Program Inovasi Desa (PID) sebagai program strategis pemerintah. Kegiatan utama dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan dengan tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa yang selanjutnya disebut BID. BID diselenggarakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan BID di salah satu daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Bojonegoro (studi pada BID cluster VI tahun 2019). Fokus penelitian ini dikaji menggunakan 10 (sepuluh) dari 21 (duapuluhsatu) indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133), yakni : kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. Subyek dari penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan BID di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada cluster VI tahun 2019 masih kurang efektif. Dari 10 (sepuluh) indikator penilaian efektivitas, hanya indikator kualitas dan internalisasi tujuan organisasi yang menunjukan penilaian cukup efektif. Penilaian pada indikator lainya menunjukan hasil yang masih kurang efektif. Sehingga sangat perlu ditingkatkan lagi perihal langkah sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan BID serta perlu adanya jaminan kesejahteraan yang lebih baik untuk anggota TPID (Tim Pelaksana Inovasi Daerah) di kecamatan.

Kata Kunci: efektivitas program, bursa inovasi desa, pemerintah desa

Abstract

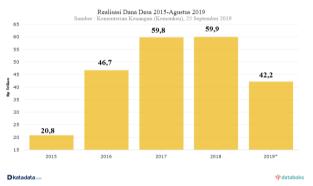
In 2017 the government through the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration (PDTT) launched the Village Innovation Program (PID) as the government's strategic program. The main activity in the PID is the Village Innovation Knowledge Management (PPID) activity which is carried out with the main stages of organizing the Village Innovation Exchange, hereinafter referred to as BID. BID is held to assist villages in improving the quality of village development activities and community empowerment that will be funded by village funds. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of BID is in one area in East Java, Bojonegoro Regency (study on BID cluster VI in 2019). The focus of this study was examined using 10 (ten) of 21 (twenty one) indicators to measure effectiveness according to Campbell in Sutrisno (2007: 131-133), namely: quality, productivity, preparedness, efficiency, growth, motivation, satisfaction, internalization of organizational goals, cohesion conflict, and adaptability flexibility. The subject of this study was determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is data collection, data reduction, data presentation, data triangulation and drawing conclusions. Based on the results of the study showed that the implementation of BID in Bojonegoro Regency, especially in cluster VI in 2019 was still less effective. Of the 10 (ten) indicators of effectiveness assessment, only indicators of quality and internalisation of organizational goals indicate that the assessment is quite effective. Ratings on other indicators show results that are still less effective. So it really needs to be improved again regarding the steps of socialization, communication, and coordination between actors involved in the implementation of BID and the need for a better welfare guarantee for TPID members (Regional Innovation Implementation Team) in the district.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebagai level pemerintahan terendah, desa sebagai ujung tombak dalam mensejahterakan masyarakat. Segala proses penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan desa itu sendiri menjadi kegiatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. (Syahrizal dalam Firdaus dan Niswah, 2018:2). Dalam menjamin penyelenggaraan desa, pemerintah memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan pembangunan. kemasyarakatan. pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan pemerintah terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan undang-undanng (Dana dkk, 2019:132).

Dana desa mulai diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2015 yang sampai pada tahun 2019 selalu mengalami kenaikan. Tidak lain ini merupakan keseriusan pemerintah agar pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat semakin berkembang menjadi lebih baik.

Gambar 1. Realisasi Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: Katadata.com 2019

Dari gambar diatas, jumlah realisasi dana desa sejak diimplementasikan, sebesar Rp 20,8 triliun di tahun 2015 dan Rp 46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016. Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari target APBN 2017. Kemudian di tahun 2018 lalu realisasi dana desa mencapai Rp 59,9 triliun atau 99,77% dari target APBN 2018. Pada tahun 2019 hingga bulan Agustus realisasi dana desa telah mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% dari target APBN 2019 (Jayani, 2019).

Pemberian dana desa yang meningkat setiap tahunnya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas. Dampak yang paling besar dengan adanya dana desa adalah dalam bidang infrastruktur desa, namun hasil tersebut masih belum cukup karena dana desa diharapkan bukan hanya memberikan dampak dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam pembangunan desa yang berbasis masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa yang masih perlu dimaksimalkan. Untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa sangat diperlukan kapasitas pemerintah desa yang mampu mengelola secara optimal mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan rencana pembangunan desa tersebut.

Kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terlihat pada aparatur pemerintah desa dan masyarakat, serta kualitas tata kelola desa dalam mengelola setiap kebijakan dan regulasi. Hal tersebut berimbas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Asep dan Elis, 2020:59-60). Sejalan dengan yang disampaiakan oleh (Henriyani, 2019:69), bahwa SDM masyarakat masih belum memadai untuk turut berpartisipasi mengelola, mengawasi dan memanfaatkan dana desa karena minimnya pengetahuan serta keterampilan untuk menggali serta mengembangkan potensi yang ada.

Menanggapi kondisi tersebut pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncuran Program Inovasi Desa (PID) sebagai program strategis pemerintah. Dalam regulasi terakhir yang mengatur mengenai pelaksanaan PID yaitu, Kepmendesa PDTT No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kepmendesa PDTT No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum PID dijelaskan bahwa peningkatan kapasitas desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD). Kegiatan tersebut untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang pengembangan ekonomi lokal kewirausahaan, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastrukur desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa.

Secara umum dari tahun 2017 hingga 2019 kegiatan PID dilakukan dengan tahapan yang tidak jauh berbeda. Kegiatan utama dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan dengan tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa Desa yang selanjutnya di sebut Penyelenggaraan BID menjadi tahapan pokok ekseskusi kegiatan PID sebagai sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa sekaligus sebagai wahana pertukaran pengetahuan desa. dan inovasi BID diselenggarakan untuk membantu dalam desa meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana desa, dengan inspirasi dan alternatif pilihan kegiatankegiatan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif dan terbukti berhasil.

oleh BID diselenggarakan masing-masing kabupaten/kota melalui Tim Inovasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari perwakilan OPD, akademisi, serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, terutama dalam penggunaan dana desa. Hingga tahun 2019 rangkaian BID sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali tahun anggaran PID yaitu anggaran PID tahun 2017, 2018, dan 2019. Dari tiga rangkaian pelaksanaan BID memiliki perbedaan dalam sistem pelaksanaanya yang dievaluasi dari pelaksanaan BID tahun sebelumnya. Pelaksanaan BID yang pada tahun 2017 dilakukan secara terpusat oleh Tim Inovasi Kabupaten di kabupaten, pada tahun anggaran 2018 dan 2019 BID dilaksanakan disetiap kecamatan atau *cluster* (gabungan) beberapa kecamatan. Hal tersebut bertujuan agar memaksimalkan kegiatan BID dengan pengelolaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa disetiap kecamatan, serta memudahkan mobilisasi peserta BID dari masing-masing desa.

BID menjadi sebuah kegiatan yang inovatif dimana forum yang dihadiri pengelola kepentingan baik dari pemerintahan daerah, pemerintah desa dan masyarakat dikemas dalam konsep sebuah bursa. Diselenggarakanya BID diharapkan agar desa bisa memperoleh pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan inovatif yang berhasil dan menjadi referensi untuk diadopsi atau di replikasi. Penyelenggaraan BID menggunakan pendekatan bursa atau expose/pertukaran gagasan dan inovasi desa, pemaparan, pengamatan,unit belajar (learning unit) atau jendela bursa, multimedia, bimbingan serta konsultasi. Hal yang paling mendasar selain pertukaran pengetahuan dan inovasi desa dari tujuan dilaksanakanya BID ini, adalah untuk menjaring komitmen pemerintah desa agar mengadopsi atau mereplikasi inovasi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari komitmen tersebut desa akan mengolah dan memasukanya kedalam RKP/APBDes tahun berikutnya yang kemudian direalisasikan. Tentu dalam hal ini penyelenggaraan BID harus benar-benar efektif karena sangat berpengaruh secara langsung terhadap rencana pembangunan desa ditahun berikutnya.

Di Kabupaten Bojonegoro, BID tahun pertama dilaksanakan pada tahun 2018 diselenggrakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Forum TPID Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara terpusat diikuti seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. Diperkuat oleh hasil wawancara salah satu Staff Satker P3MD Provinsi Jawa Timur bapak Fajar menyatakan bahwa, pada tahun 2018 sebenarnya BID sudah diselenggarakan oleh masing-masing kecamatan atau cluster gabungan beberapa kecamatan. Namun beberapa daerah yang baru menyelenggarakan, sebagai langkah awal stimulus mereka menyelenggarakan BID masih secara terpusat di kabupaten salah satunya Bojonegoro.

Kebaharuan program dan waktu pelaksanaan yang kurang tepat serta kendala teknis dalam penyelenggaraan, menjadi evaluasi dari BID tahun pertama 2018. Hal tersebut sangat berpengaruh pada proses dan hasil keluaran produk dari BID yang belum maksimal tercapai. Bahkan masih banyak desa yang kemudian menganggap kegiatan BID ini hanya kegiatan workshop biasa saja belum bisa memaknai secara penuh mengenai bagaimana kegiatan BID ini bisa menjadi media untuk pembangunan desa yang lebih baik dan inovatif.

Berangkat dari evaluasi ditahun sebelumnya, di tahun 2019 TIK (Tim Inovasi Kabupaten) bersama TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) di Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan BID secara sistem cluster gabungan dari beberapa kecamatan yang di bagi menjadi 7 (tujuh) cluster. Pelaksanaan BID disetiap cluster I-VII mulai diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 dan secara serentak bergantian dilaksanakan di masing-masing cluster. Secara garis besar dalam pelaksanaan BID Tahun 2019 dengan sistem *cluster* berialan dengan baik terlihat dari hasil inovasi yang dipilih desa keseluruhan dalam BID sudah hampir mencapai sasaran prioritas PID dengan presentase inovasi dibidang kewirausahaan sebanyak 43%, bidang Infrastruktur 36,2% dan bidang PSDM 20,7%. Meskipun demikian tentu masih belum mencapai target maksimal prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa dalam PID dimana PSDM menjadi prioritas inovasi diatas Infrastruktur.

Selain itu berdasarkan data yang diambil dari DPMD Kabupaten Bojonegoro mengenai hasil pelaksanaan BID tahun 2019 masih ditemui hasil yang masih kurang maksimal. Dari segi pelaporan misalnya ternyata masih ditemui TPID yang menyetorkan hasil BID yang kurang sesuai dengan hasil di lapangan. Hal tersebut di perkuat oleh hasil wawancara dengan Admin BID Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 Bapak Hasan menyebutkan, bahwa terkait data yang dikirimkan oleh masing-masing TPID, beberapa kali menemui tidak sesuai dengan hasil BID dilapangan, ada kemungkinan juga karena ini kepentingan orang banyak tentu ada permainan kepentingan juga didalamnya.

Hal tersebut tentunya berimbas pada hasil pelaporan BID yang seharusnya bisa menjadi ukuran penilaian dari pelaksanaan BID yang valid menjadi kurang sesuai. Bukan hanya itu dalam hal waktu pelaporan beberapa TPID selalu mengulur waktu pelaporan hingga melebihi batas yang ditentukan sama dengan yang terjadi pada BID tahun 2018. Hal tersebut tentunya akan menghambat proses evaluasi dari kegiatan BID yang telah dilaksanakan serta pengambilan langkah pengawalan. Disisi lain terkait tingkat partisipasi dan kartu komitmen yang terekap juga masih menunjukan hasil yang kurang maksimal. Berikut hasil data hasil BID Kabupaten Bojonegoro tahun 2019

Tabel 1. Data Pelaporan BID Kabupaten Bojonegoro tahun 2019

	Nama	Jml.	Jml.	Prsnts	Jml.	Prsnts	Ket
No	Cluster	desa	desa		desa		
			yang		yang		
			hadir		berko		
					mitme		
					n		
1.	Cluster	59	57	96,6%	50	87,7%	-
	1						
2.	Cluster	47	43	91,5%	27	62,7%	-
	2						
3.	Cluster	56	56	100%	42	75%	-
	3						
4.	Cluster	46	46	100%	46	100%	-
	4						
5.	Cluster	74	51	68,9%	33	64,7%	-1 Kec
	5						(23)
6.	Cluster	73	58	79,4%	38	65,5%	
	6						
7.	Cluster	64	47	73,4%	34	72%	-1 Kec
	7						(17)
Jumlah		419	358	85,4%	270	75 %	-2 Kec
							(40)

Sumber: DPMD Kabupaten Bojonegoro 2019

Walaupun dengan sistem *cluster* yang diharapkan mampu untuk menarik partisipasi desa secara penuh namun dibeberapa *cluster* terkait partisipasi desa yang hadir dalam BID masih belum maksimal dengan rata rata kehadiran desa sekitar 85-90%, jika dibandingkan tahun 2018 dengan tingkat kehadiran desa mencapai 80-85% tentu sudah mengalami peningkatan namun masih belum signifikan. Selain itu berdasarkan tabel data diatas, jumlah desa yang berkomitmen dalam BID tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah rata-rata sekitar 75-78% dari jumlah desa yang hadir dalam BID secara keseluruhan, bahkan di beberapa *cluster* jumlah desa yang berkomitmen hanya sebanyak 60-65%. Salah satu *cluster* dengan jumlah partisipasi desa dan jumlah desa yang berkomitmen paling sedikit adalah pada *cluster* VI.

Cluster VI terdiri dari 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Baureno, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Kedungadem dengan jumlah desa sebanyak 73 Desa termasuk cluster dengan jumlah desa terbanyak. Daerah dalam cluster VI ini merupakan daerah yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Bojonegoro dengan daerah lamongan. Sehingga memang untuk lokasi kecamatan berada dipinggirian kabupaten. Dalam hal tingkat partisipasi desa dalam BID cluster VI berdasarkan tabel diatas, tercatat sejumlah 58 desa dengan presentase 79,4% dari total jumlah desa dan desa yang berkomitmen sejumlah 38 desa dengan presentase 65% dari jumlah desa yang hadir. Jumlah tersebut terbilang masih rendah dan menunjukan bahwa masih kurang efektifnya pelaksanaan BID tahun 2019 khususnya di cluster VI dibanding cluster yang lain.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas membuktikan bahwa pelaksanaan BID menunjukan hasil

yang kurang maksimal. Masih ada beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan dan secara otomatis tentu berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pelaksanan BID. Efektivitas sebuah program sangat penting untuk diperhatikan mengingat setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui program-program tentu diharapkan memberikan hasil yang maksimal. Penilaian tersebut tentang sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan bisa direalisasikan (Matuszak-flejszman and Szyszka, 2019). Dari analisis efektivitas tersebutlah akan menjadi pertimbangan sebagai evaluasi tentang bagaimana keberlanjutan program atau kegiatan kedepan.

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan peneliti sebagai acuan dalam hal menganalisis maupun penggunaan metode penelitian, diantaranya: penelitian dari Asep Nurwanda dan Elis Badriah tahun 2020 dengan judul Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Kemudian penelitian dari Desy Amelia Nurgiarta tahun 2018 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Kabupaten Lamongan, Berondong dalam Skripsi Universitas Negeri Surabaya. Kedua penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) dan menunjukan sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak yang positif bagi desa.

Dari uraian diatas mengenai pelaksanaan BID di Kabupaten Bojonegoro dan acuan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran efektivitas pelaksanaan BID di Kabupaten Bojonegoro khususnya di *Cluster* VI tahun 2019. Penelitian ini akan dikaji menggunakan 10 dari 21 indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133), yang terdiri dari : kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. Indikator tersebut, akan digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa *Cluster* VI Tahun 2019).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji tentang Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster VI Tahun 2019). Sedangkan fokus penelitian akan dikaji menggunakan 10 (sepuluh) dari 21 (duapuluhsatu) indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133), Indikator yang dipilih mungkin disesuaikan semaksimal dengan berjalanya program dan fokus permasalahan penelitian, vakni: kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi

Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak pertama atau informan yang terlibat langsung dalam kegiatan BID *cluster* VI dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling*. Selain itu sumber data dalam penelitian ini juga dari data skunder berupa artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, publikasi pemerintahan, hasil survei terdahulu, laporan-laporan serta dokumen lainya yang berhubungan dengan pelaksanaan BID *cluster* VI. Dalam proses pengumpulan data agar bisa diperoleh secara maksimal, digunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian sebagai subyek wawancara secara langsung ditujukan kepada:

- 1. Bapak Fatkur selaku PIC BID tahun 2019
- Bapak Yahya selaku Ketua Pelaksana BID *cluster* VI sekaligus ketua TPID Kecamatan Kepohbaru
- 3. Bapak Farid Selaku Ketua TPID Kecamatan Kedungadem
- Perwakilan peserta BID yang terdiri dari Desa Sidomulyo Bapak Irfan, Desa Sidorejo Bapak Antok, Desa Jipo Bapak Syahudi, dan Desa Sidomukti Bapak Abdul Aziz.

Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan metode menurut (Miles dan Huberman, 2012), meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka dapat dilakukan sebuah analisis Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa *Cluster* VI Tahun 2019) dengan menggunakan 10 (sepuluh) dari 21 (duapuluhsatu) indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133), yakni : kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. Berikut ini penjelasanya :

1. Kualitas

Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) kualitas diartikan sebagai tingkatan kesesuaian jasa atau produk utama yang dihasilkan dengan kebutuhan sasaran program. Kualitas merupakan karakteristik sebuah produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pelanggan/kelompok sasaran (Harvanto, 2013:1466). Kualitas menunjukan terjaminya output didalam sebuah program atau kegiatan yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dalam hal kualitas pengukuran dilihat dari segi kualitas menu inovasi yang disajikan dalam BID, karena ini sangat berpengaruh dengan hasil komitmen replikasi inovasi oleh desa. Menu inovasi merupakan sebuah kumpulan referensi inovasi yang disajikan dalam bursa sebagai menu yang akan dipilih dan dituliskan kedalam kartu komitmen oleh peserta BID yang hadir. Untuk melihat sejauh mana kualitas menu inovasi dapat diamati dalam proses penyusunan menu inovasi tersebut.

Dalam prosesnya menu inovasi terdiri dari menu nasional dan menu lokal. Menu nasional merupakan menu yang disiapkan oleh Kemendesa PDTT dari data inovasi seluruh indonesia hasil dari kartu IDE pada BID tahun sebelumnya. Menu nasional yang diverifikasi dan dipilih oleh kementrian pusat kemudian didistribusikan kepada setiap kabupaten dan di distribusikan pula kepada TPID. Dalam proses penyeleksian tersebut sudah disesuaikan dengan prioritas dalam Program Inovasi Desa (PID) yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) bidang kewirausahaan, pengembangan SDM, dan Infrastruktur. Sedangkan menu lokal adalah menu inovasi yang diperoleh dari proses capturing (pendokumentasian) didesa perwakilan setiap kecamatan yang sudah berhasil diterapkan. Menu inovasi lokal melewati tahap yang dimulai dari TPID yang mengajukan menu inovasi untuk di-capturing kepada Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Dari Tim Inovasi Kabupaten kemudian memilah dan menentukan dinovasi tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa di cluster VI. Kemudian dilakukan capturing di desa yang sudah di verifikasi oleh TIK.

Melihat dari setiap proses persiapan menu inovasi bisa disimpulkan baik menu inovasi nasional maupun lokal sudah disiapkan sebaik mungkin dengan penyeleksian sesuai dengan regulai yang berlaku. Dan dilihat dari menu inovasi yang dibursakan pada BID cluster VI dari menu inovasi lokalnya juga sudah disiapkan dengan baik sesuai potensi yang dimiliki oleh desa setempat, dan proses capturing juga dilakukan sesuai prosedur dan penilaian yang sudah sesuai dan kemudian ditampilkan di BID. Karena karakteristik dalam satu cluster tidak jauh berbeda dengan adanya menu inovasi lokal tersebut sangat memungkinkan untuk direplikasi oleh desa setempat. Dengan demikian kualitas produk yang dihasilkan berupa menu inovasi yang ditampulkan sudah baik, meskipun masih ada beberapa desa yang tidak berkomitmen baik karena belum menemukan inovasi yang sesuai ataupun kendala komunikasi serta koordinasi pada waktu palaksanaan kegiatan.

2. Produktivitas

Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) produktivitas merupakan pengukuran untuk sebuah kuantitas/jumlah atau volume produk atau jasa utama yang dihasilkan dalam sebuah organisasi. Produktivitas juga didefinisikan sebagai hasil antara output/produk yang dikeluarkan dengan input yang menggunakan sumber daya manusia (Firdiyanti, 2017:3). Berdasarkan produk utama yang dihasilkan dari pelaksanaan BID khususnya di *cluster* bisa dianalisis berdasarkan kelengkapan keanekaragaman menu inovasi, media bursa yang disiapkan oleh TPID dan kartu komitmen yang dihasilkan. Sesuai dengan Panduan Teknis Pelaksanaan BID tahun 2019, menu inovasi terbagi menjadi 3 (tiga) bidang sesuai dengan sasaran prioritas PID yaitu inovasi dibidang kewirausahaan, pengembangan SDM, dan infrastruktur.

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, pada pelaksanaan BID *cluster* VI untuk menu inovasi yang ditampilkan baik menu nasional dan menu lokal sudah memenuhi bidang kegiatan sesuai dengan panduan BID tersebut. Setiap bidang kegiatan yang dibursakan ditampilkan dalam bilik bilik khusus. Ada 3 bilik yang

disiapkan yaitu bilik kewirausahaan, pengembangan SDM/pemberdayaan, dan infrastruktur, berikut gambar bilik di BID *cluster* VI:

Gambar 2. Bilik Menu Inovasi BID *cluster* IV Kabupaten Bojonegoro 2019



Sumber: Arsip Dokumentasi BID cluster VI

Disetiap bilik tersebut berisi media bursa agar lebih mudah untuk dipahami oleh peserta yang terdiri dari banner, penampilan video, serta poster pamflet yang diberikan untuk peserta, dan juga dari panitia bursa juga menyiapkan stan pameran produk asli masyarakat berupa makanan, minuman, kerajinan dari wilayah *cluster* VI. Selain kegiatan yang berfokus dalam bilik ada juga penampilan video bersama 3 (tiga) menu inovasi nasioanal dan 3 (tiga) lokal yang dipresentasikan oleh Bapak Fatkur selaku PIC BID.

Namun tanggapan dari beberapa peserta yang hadir masih menunjukan bahwa mereka masih minim mengetahui tentang menu inovasi dan kegiatan lainya yang berusaha disajikan oleh panitia pelaksana. Menu inovasi yang ditampilkan hanya menu lokal karena peserta kurang bisa fokus dan terarah sehingga yang dipahami hanya menu inovasi lokal. Sedangkan menu yang lainya mungkin memang ada namun tidak ditampilkan dengan baik sehingga yang dipahami peserta, hanya tampilan yang paling dominan yaitu menu lokal. Berikut beberapa sampel menu inovasi lokal yang di *capturing* pada BID *cluster* VI:

- Modal Usaha Sayur Keliling dan Sablon dari Desa Mojosari
- 2. Posyandu Lansia dari Desa Ngranggonganyar
- Energi Tepat Guna Dari Limbah Kotoran Sapi dan Wisata Waduk Dari Desa Sidomukti
- 4. Wisata Pemancingan Embung dari Desa Duwel
- 5. Olahan Kripik Kelur Singkong dan Seni Tari Jaranan dari Desa Panjang.

Sebenarnya kelengkapan menu inovasi sudah baik mulai dari menu inovasi kewirausahaan, pengembangan SDM/pemberdayaan, dan infrastruktur, namun menu yang disediakan masih kurang sesuai dengan keadaan desa setempat ditambah lagi fokus pembangunan desa juga berbeda beda. Hal tersebut menyebabkan beberapa desa enggan untuk mengisi kartu komitmen karena belum menemukan ide inovasi yang sesuai keadaan. Seperti yang terjadi pada Desa Jipo Bapak Syahudi menyampaikan memang belum menemukan inovasi yang sesuai dan keadaan desa masih fokus pada pembangunan pasar desa.

Sesuai data yang didapatkan dari pelaporan BID di DPMD, jumlah desa yang berkomitmen di BID *cluster* VI

hanya sebanyak 65,5% dari desa yang hadir. Jumlah tersebut terbilang masih kurang karena memang dari tujuan dilaksanakanya BID agar setiap desa bisa berkomitmen untuk mereplikasi inovasi yang dibursakan. Melihat dari kondisi tersebut bisa disimpulkan dalam hal tingkat produktivitas dari menu inovasi sudah tersedia dengan baik namun dari segi produktivitas kartu komitmen pada pelaksanaan BID *cluster* VI masih cukup rendah. Hal tersebut makin terlihat jika kita melihat produktivitas menu inovasi yang sudah baik seharusnya bisa berpengaruh dengan hasil kartu komitmen secara maksimal namun hasilnya pada BID *cluster* VI masih terbilang cukup rendah, apalagi jika dibandingkan dengan *cluster* yang lain.

3. Kesiapsiagaan

Menurut Narieswari dalam Ula dkk (2019:107) dalam konsep penanganan bencana, kesiapsiagaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dengan pengorganisasian dan langkah yang sesuai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) yang mendefinisikan kesiapsiagaan dengan penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik. Secara sederhana penilaian mengenai kesiapsiagaan dalam pelaksanaan BID cluster VI dianalisis bagaimana persiapan sebelum berlangsung, penanganan dan mobilisasi selama kegiatan berlangsung serta susunan kepengurusan BID cluster VI.

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dimulai dari persiapan BID atau kegiatan pra BID salah satu strategi dari panitia pelaksana yaitu TPID adalah melakukan sosialisasi dan pendistribusian menu inovasi ke desa desa. Kegiatan tersebut dilakukan juga bersama pendamping desa. Namun pada pelaksanaanya ternyata belum berjalan maksimal, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa desa diwilayah cluster VI mereka menyampaikan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi hanya berupa penyerahan undangan sedangkan pendistribusian menu inovasi belum ada. Bahkan ada beberapa desa yang tidak hadir dalam BID salah satunya dari Desa Sidomulyo, pihak desa tersebut tidak menerima undangan dan tidak mengetahui ada kegiatan BID tersebut, dari pendamping desa pun kurang melakukan komunikasi mengenai informasi pelaksanaan BID. Ini menandakan bahwa memang dalam proses sosialisasi di kegiatan pra BID masih perlu adanya evaluasi, utamanya adalah dari langkah TPID dan pendamping desa. Wilayah cluster VI yang paling dominan banyak kendala dalam proses sosialisasi adalah Kecamatan Kedungadem.

Banyak faktor yang menyebabkan proses sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal, kendala dalam sosialisasi yang paling sering adalah karena lokasi yang jauh dan medan yang masih sulit untuk dijangkau. Bahkan pendamping desa yang seharusnya mampu untuk menjangkau desa desa tersebut masih kurang maksimal dalam melakukan sosisalisasi. Bukan hanya itu, keberhasilan sosialisasi juga tergantung dari pelaksana TPID masing masing kecamatan, sejalan dengan pendapat Ketua pelaksana BID Bapak Yahya, untuk sosialisasi dan pendistribusian menu inovasi sepenuhnya menjadi

tanggung jawab TPID masing-masing kecamatan dan pendamping desa. Jadi kembali lagi pada TPID dan pendamping desa dalam melakukan tanggung jawab tersebut seperti apa.

Selain itu, dari segi proses pelaksanaan BID, penyampaian menu inovasi yang di sediakan belum tersampaiakan dengan baik karena kondisi acara yang kurang jelas, saling bersuara dan pelaksana kegiatan kurang bisa mengatur kebisingan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Fatkur selaku PIC BID yang ikut serta hadir di BID cluster VI, bahwa memang keadaaan terkesan kurang tertib karena strategi panitia cluster VI memang dengan mendahulukan kegiatan kunjungan konsultasi agar banyak komitmen yang bisa terjaring, namun banyak peserta yang hadir dengan tidak tepat waktu. Beberapa desa datang ketika acara sambutan dimulai, imbasnya kegiatan menjadi tumpang tindih antara menulis kartu komitmen, konsultasi dan mendengarkan sambutan-sambutan. Akhirnya peserta yang hadir kurang begitu memperhatikan dan pulang begitu saja setelah kegiatan sambutan selesai karena mengira acara memang sudah selesai. Salah satu peserta Kepala Desa Sidorejo Bapak Antok, dalam wawancara yang dilakukan peneliti juga menyampaikan menyayangkan sikap panitia pelaksana BID. Seakan kurang cakap dan terkesan acuh dalam menyambut dan mengarahkan peserta yang hadir, dan juga proses konsultasi tidak berjalan dengan lancar karena keadaan yang kurang terarah.

Dalam hal struktur susunan/birokrasi kepengurusan BID *cluster* VI juga dapat dianalisis mengenai kesiapan dalam mobilisasi masa. Keberhasilan sebuah program atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur kepengurusan/birokrasinya (Aisyah dkk, 2017:3) Berikut gambar sususnan kepengurusan BID *cluster* VI:

Gambar 3. Susunan Kepengurusan BID *cluster* IV Kabupaten Bojonegoro 2019

		PENGURUSAN						
		DESA CLASTER VI						
		KECAMATAN KEPOHBARU, BAURNO, KEDUNGADEM TAHUN 2019						
	TAH	UN 2019						
i.	KETUA BID CLASTER VI	: MOH YAHYA						
2.	SEKRETARIS BID CLASTER VI	: KHOIRUL						
3.	BENDAHARA BID CLASTER VI	: FARID M						
4.	SEKSI-SEKSI							
	a. SEKSI KESEKRETARIATAN	: MUKHLISHATIN						
		ISTIQOROH						
	b. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	: SHORIHATUL HASANAH						
		UMIATUN						
	c. SEKSI DEKORASI DAN PENATAAN	: EDDY KURNIAWAN						
		M RIFA'I						
		NURUL HASATUN F						
	d. SEKSI STAND	: MATKOMARI						
		NAJIUL KHOIR						
		KETUT BUDI						
	e. SEKSI PENGUMPULAN KARTU IDE	: CAHYA DWI RETNO WULAN						
	DAN KOMITMEN	M. MUBIN						
	f. SEKSI PERLENGKAPAN	: KHALIFATUNNI'MAH, A.Md						
		MULYONO						
		EKA YANUAR RATNA						
	g. SEKSI KONSUMSI	: IKA RISTYANI PUSPITA DEW						
		SITI NURHAYATI						
		YULIANA ROHMA						

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat mengenai pembagian tanggungjawab/tugas dengan membagi dalam bentuk seksi-seksi, namun diantara semua seksi yang sudah terbagi, seksi yang bertanggungjawab mengenai jalanya acara dan kondisi lapangan masih belum ada. Seperti kegiatan pada umumnya ada istilah seksi acara dan koordinator lapangan, kedua unit tersebut merupakan ujung tombak dalam mengatur jalanya acara. Dengan adanya kedua unit tersebut akan membuat jalanya acara bisa lebih dikendalikan karena unit tersebut bisa fokus mengenai kelancaran jalanya acara. Jika tugas tersebut tidak dikhususkan tersendiri tentu akan menyebabkan acara menjadi kurang lancar karena fokus seksi-seksi akan terpecah dengan tanggung jawab prioritasnya masingmasing.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam proses persiapan kegiatan, penanganan serta mobilisasi peserta dalam BID *cluster* VI masih berjalan dengan kurang baik. Selain itu masih belum adanya seksi/unit khusus yang fokus mengatur jalanya acara juga menjadi hal yang saangat berpengaruh terhadap kelancaran acara. Beberapa hal tersebut berakibat kurang maksimalnya kartu komitmen yang terdata/tertulis oleh desa, dimana seharusnya kartu komitmen ini menjadi keluaran utama dalam kegiatan BID ini.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut (Paat dkk, 2019: 2982) . Mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan BID dianalisis dengan melihat perbandingan hasil pencapaian pelaksanaan BID terhadap biaya/sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Besaran output dan input yang dihasilkan dianalisis dari segi peserta dan pelaksana BID. Sesuai hasil wawancara yang diperoleh peneliti, besaran usaha yang dilakukan desa sebenarnya tidak banyak, hanya perlu datang memenuhi undangan dan berpartisipasi aktif. Panitia pelaksana sudah menyiapkan menu inovasi yang ditampilkan sebagai wawasan untuk peserta, selanjutnya memang bergantung kepada masing masing peserta menyikapi apa yang sudah ditampilkan dan disediakan oleh panitia pelaksana. Namun masih juga ditemukan keluhan beberapa peserta, bahwa sebenarnya jika kegiatan diarahkan dengan baik akan berjalan secara maksimal namun karena mobilisasi peserta dan waktu juga kurang sesuai menyebabkan kegiatan berjalan kurang maksimal.

Dari segi pelaksana kaitanya dengan anggaran, hampir setiap pengeluaran untuk kegiatan BID saja disetiap *cluster* masing-masing kurang lebih menyerap anggaran sekitar 30 juta. Pada pelaksanaan BID di *cluster* VI sendiri sesuai DOK BID *Cluster* VI tahun 2019 menyerap anggaran sebesar Rp 31.665.450,00, berikut gambar rincian anggaran dalam LPJ Keuangan BID *Cluster* VI:

Gambar 3. Rincian KAS Umum BID *Cluster* VI Kabupaten Bojonegoro 2019

L.2 Buche Keis Umiser BRAIN LEAD UNITED BRAIN BROWNER DEEL FROGRAM HINWARD SEES, FEDD CLASTER & CRAHINGO, REFORMARD, RESUMMADER) KAMUNTATIO SCIONCHOOL OF THAN 2015									
No	Hari/tanggal	No Buktl/ Kultansi	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo			
2	Selasa/21-10-19 Karnis/24-10-19	10401/015/11/19	Terma dena dari claster 6	31,665,450	respondent	31,665,4			
_	100.000.00.00	EXD1/CF6/11/19	Rapet awar persiapan petiksanaan a. Konsumsi Peserta			44,000			
			- Spark			2000			
			- Makan	_	232,000	31,433,4			
			- Minum Aqua Gelas		522,000 70,000	30,911,4			
_					75,000	30,766,4			
_			- Tea		35,000	30,731,4			
			b. ATK		111,450	30,620,01			
2	Selasa/29-10-19	IXX02/Cir6/11/19	c. Kebersinan Pembelan ATK Kasekretariatan		300,000	10,320,0			
	-	XX02/CHG/11/19	Kertas HVS	_	700.000	20.100.00			
		KK02/CH6/11/19	Karton Harsia		190,000	30,170,00			
			Spico WhiteBoard		320,000	29.710.00			
_		KK02/CH6/11/19	Spidol Kacil		120,000	29,590,00			
_		KK002/CHG/11/19	Map		350,000	29.230.00			
		KX02/CHG/11/19	Ampico		60,000 175,000	29,170,00			
_		KK02/CHG/11/19 KK02/CHG/11/19	Balporit			28,995,00			
3	Kerns/07-11-19	KK02/CHQ/11/19	Stempel Mubes ATK Peserta	-	105,000	28,890,00			
		KKD3/CH6/11/19	- Map	-	772,000	28,115,00			
		KKD3/CH5/11/19	- Book Note		675 500	27,442,50			
		8003/Ch9/11/19	- Pulpen		675,500 482,500	26,960,00			
_		KKC3/CrG/11/19	- Pensi		579,000	26,381,00			
_	_		Meteri :						
-		KK04/CH6/11/19 KK05/CH6/11/19	Kartu Komitren Kartu Ide		481,500	25,859,50			
_		K05/G0911/19	Logitik Peserta BID	-	482,500	25,417,00			
4	Selasa/12-11-19	KKD6/CH9/11/19	Nasi Box	-	4,825,000	20,592,00			
			Snack		1,737,000	18,855,00			
		IOXD8/CHV11/19	Snack Tamu		500,000	18,355,00			
		K409/CH6/11/19	Kopi		200,000 150,000	18,155,00			
-		KK10/CH6/11/19	Tea		150,000	18,005,00			
_		KK11/CH5/11/19 KK12/CH5/11/19	Air Mineral Gelas Air Mineral Botol		245,000	17,760,00			
		NALEGO OF TALLY	Peraiatan	_	200,000	17,560,00			
			Kostum Paniša		2,800,000	14,760,00			
		KK14/CH5/11/19	Laptop		750,000	14,010,00			
		XX15/CH5/11/19	Printer		300,000	13,710,00			
-		KK16/CH6/11/19	Infocus dan layar		2,800,000	10.910.00			
-			Sound System		1,700,000	9,210,0			
		KK17/CH5/11/19 KK18/CH5/11/19	a, Banner Utama b. Spot Selfi		472,000	8,738,00			
			c. X Senner		345,000	8,393,00 7,853,00			
		IOQ0/Ort/11/19	5. Banner Selamet Detano		540,000 97,000	7,756,00			
-		XX21/Ch6/11/19	s. Banner Pintu Masuk		201,000	7,555.00			
-		KK18/Ciri/11/19	Terop		1,200,000	6,355,00 5,390,00			
		KK19/Ch9/11/19	Grs		965,000	5,390,00			
		RKQ0/CH6/11/19 R RKQ1/GH6/11/19	Meja		250,000	5,140,00			
		9X22/Griy11/19 5	Taplak Meja Sewa Gedung		3,000,000	5,090,00			
_		4K23/Only11/19	rledia Elektronik	_	3,000,000	42000,000			
		8K24/Gr6/11/19 P	Caber Posts		500,000 1,500,000	1,590,000			
		4K25/Grt/11/19 K	amera Digital		1,500,000	90,000			
		10Q6/Qr6/11/19 P	engadaan CD Kosong		90,000	-			
		Jumleh Total		11,665,450	- 1				
	-NJ	Aluo VIERO	April	Bendanaya	Baurne, 21 Desi				

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari total anggaran tersebut khususnya di *cluster* VI panitia pelaksana sudah berusaha menjalankan kegiatan BID sesuai RAB yang sudah dibuat dan hasil akhirnya juga secara garis besar sudah sesuai. Namun ada satu hal yang mungkin sangat mempengaruhi kinerja TPID yaitu perihal tunjangan kesejahteraan/honor, sangat wajar jika tunjangan kesejahteraan/honor menjadi hal yang diperhitungkan melaksankan pekerjaan, dalam namun melaksanakan pekerjaan TPID hanya difasilitasi anggaran oprasional, anggaran oprasional hanya diberikan sesuai perhitungan kebutuhan kegiatan bukan sebagai fasilitas tunjangan untuk anggota. Padahal selama kegiatan TPID berjalan banyak sekali pengeluaran tidak terduga dan juga waktu serta pikiran yang terforsir seperti hanya dilakukan secara sukarela. Bahkan juga karena anggota TPID merangkap dengan pekerjaan lain terkadang diwaktu tertentu juga mengharuskan untuk menunda pekerjaan tersebut demi kelancaran pekerjaan TPID. Hal ini menjadi sesuatu yang dikeluhkan oleh TPID karena memang wajar dan sangat manusiawi, bahkan dari wawancara dengan Ketua Pelaksana BID cluster VI Bapak Yahya menyampaiakan bahwa jika BID akan diadakan lagi kemungkinan besar anggota yang sebelumnya enggan untuk berpartisipasi kembali menjadi TPID jika kendala tentang honor masih sama.

Secara keseluruhan efesiensi anggaran memang masih belum sesuai, seharusnya anggaran yang dikeluarkan dalam PID dan BID kemungkinan masih bisa untuk dipangkas, sebagai contoh dalam kegiatan capturing (dokumentasi inovasi di perwakilan desa berupa video) seharusnya bisa dilakukan tanpa mengambil pos anggaran dari PID karena desa sudah semestinya bisa melakukan capturing sendiri walaupun mungkin tetap didampingi dan dibantu oleh TPID, sehingga TPID bisa langsung menerima hasil capturingnya tanpa harus mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan capturing. Dengan demikian dari

beberapa temuan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa pihak peserta dan pelaksana BID khususnya di *cluster* VI memang dari segi peserta kegiatan BID sudah cukup efisien dilaksanakan walaupun mungkin masih ada kekurangan. Sedangkan dari segi pelaksana kaitanya dengan pengelolaan anggaran masih ditemui beberapa kendala yang sudah pasti mempengaruhi hasil dari kegiatan BID seperti perihal tunjangan kesejahteraan/honor TPID dan juga tentang pemangkasan anggaran lainya.

5. Pertumbuhan

organisasi, Didalam konteks pertumbuhan merupakan salah satu indikator penting dari kinerja organisasi secara keseluruhan (Haque dkk, 2016:7). Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) pertumbuhan dilihat sebagai suatu perbandingan antara keadaan organisasi masa sekarang dengan keadaan masa lampau. Pada pelaksanaan BID tahun 2019 sudah banyak mengalami perubahan yang cukup baik dibandingkan pada pelaksanaan BID tahun 2018. Sesuai hasil wawancara yang diperoleh peneliti, pada tahun kedua dilaksanakanya BID sudah cukup banyak perubahan yang dilakukan evaluasi dari tahun 2018, mulai dari sistem pelaksanaan yang berubah yang awalnya terpusat menjadi sitem cluster yang terdiri dari beberapa kecamatan untuk melaksanakan BID secara mandiri. Hal ini dilakukan agar kegiatan BID bisa menjangkau seluruh desa serta memperbesar kemungkinan BID bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan desa karena kondisi desa masih sama-sama satu geografis. Selain itu, pada tahun 2019 para aktor pelaksana BID berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan langkah dan strategi pelaksanaan. Seperti pembuatan bilikbilik konsultasi sesuai dengan bidang inovasi, dan langkah sosialisasi pendistribusian menu inovasi sebelum BID. Semua itu dilakukan agar output replikasi kartu komitmen yang masuk dalam APBDes bisa menjadi lebih banyak.

Dari upaya perbaikan tersebut ternyata masih ditemukan hasil yang kurang maksimal, sesuai data dari DPMD Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh, pada tingkat partisipasi kehadiran desa di BID 2019 rata rata sekitar 85-90%, jika dibandingkan tahun 2018 dengan tingkat kehadiran desa mencapai 80-85% tentu sudah mengalami peningkatan namun masih belum signifikan. Selain itu jumlah desa yang berkomitmen dalam BID tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah rata-rata sekitar 75-78% dari jumlah desa yang hadir dalam BID secara keseluruhan, bahkan di beberapa *cluster* jumlah desa yang berkomitmen hanya sebanyak 60-65%, salah satunya pada pelaksanaan BID di *cluster* VI.

Disisilain, pelaksanaan BID di *cluster* VI dalam aspek kinerja TPID sudah mengalami perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari kinerja TPID pada 2018 yang lalu hanya sebatas pengkoordinir bersama pendamping desa untuk mensosialisasikan kegiatan BID yang dilaksanakan secara terpusat. Sedangkan pada tahun 2019 TPID benar-benar menjalan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis Oprasional PID 2019, yaitu diantaranya mengadakan capturing, melakukan sosialisasi, dan mengadakan BID secara *cluster* yang terdiri dari 3 (tiga)

kecamatan. Hal ini menunjukan bahwa dari segi pertumbuhan BID dalam persiapan dan sistem sudah mengalami peningkatan yang baik, namun dalam hal hasil berupa tingkat partisipasi dan jumlah kartu komitmen belum nenunjukan perkembangan yang signifikan.

6. Motivasi

Menurut Limakrisna dalam Maulana dkk (2019:80) motivasi merupakan sebuah dorongan dalam diri yang mampu menggerakkan perilaku dan memberikan arah dan tujuan pada perilaku seseorang. Motivasi sendiri memiliki berhubungan positif dengan komitmen organisasi, ketekunan dan kinerja, serta keterlibatan perilaku di dalam organisasi (Jabagi dkk, 2019:5) Sejalan pengertian tersebut, motivasi berarti adanya kecenderungan seseorang untuk melibatkan dirinya dalam sebuah kegiatan yang terarah, karena perasaan dorongan untuk mencapai sebuah tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan BID keberhasilan diukur dari bagaimana tingkat motivasi peserta BID untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan dari BID.

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, secara garis besar peserta yang hadir sudah menunjukan tumbuhnya motivasi untuk berusaha menggali inovasi desa dengan replikasi kartu komitmen yang sudah difasilitasi oleh panitia pelaksana. Namun beberapa peserta walaupun termotivasi namun masih ada beberapa peserta yang tidak mengisi kartu komitmen salah satunya dari Desa Jipo. Semangat dalam mengembangkan inovasi selama kegiatan BID tentu tumbuh namun kembali lagi menyesuaikan keadaan desa, dan juga memang dari menu yang ditampilkan dari Desa Jipo masih belum menemukan inovasi yang sesuai. Ditambah lagi, fokus pembangunan desa juga memang sedang fokus pembangunan infrastruktur karena dinilai masih kurang pembangunanya bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan BID serta bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan menjadi aspek yang terpenting juga, karena panitia pelaksana juga bertanggung jawab dengan jalanya konsultasi mengenai inovasi serta memilih komitmen dari menu inovasi yang disediakan agar sesuai. Beberapa desa menanggapi bagaimana pelaksanaan BID, mereka menilai memang masih kurang maksimal. Respon peserta dalam BID berbeda-beda ada yang memang berpartisipasi aktif dan ada yang kurang, hal tersebut bisa terjadi karena bagaimana mobilisasi peserta serta keadaan yang kurang bisa terarah membuat beberapa desa kurang tertarik dengan rangkaian acara yang ditampilkan karena keadaan tidak mendukung. Terkait motivasi tentu termotivasi tetapi kembali lagi karena kondisi yang kurang terarah membuat beberapa peserta salah satunya dari Desa Sidorejo menjadi kurang berminat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan.

Dengan demikian menandakan bahwa tingkat motivasi peserta berbeda beda khususnya di *cluster* VI, tergantung bagaimana mereka berpartisipasi selama kegiatan. Secara garis besar pesrta yang hadir sudah termotivasi namun hasil tersebut dirasa masih kurang masksimal, jika dilihat dari tanggapan beberapa peserta yang tidak mengisi kartu komitmen mengeluhkan juga perihal proses jalanya acara yang kurang terarah, sehingga konsultasi dan komunikasi belum terlaksana dengan baik.

Secara otomatis hal tersebut mempengaruhi peserta dalam memilih menu inovasi yang ditampilkan. Selain itu, kembali lagi kepada masing masing desa sebagai peserta menanggapi kegiatan BID ini karena setiap desa tentunya memiliki kepentingan yang berbeda beda dalam mengelola pembangunan.

7. Kepuasan

Menurut Kotler dalam Kurbani (2017:25) kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Kaitanya dengan pelaksanaan BID, kepuasan yang dimaksud adalah tingkat kesenangan dan rasa terpenuhinya keinginan yang diharapkan baik peserta maupun pelaksana kegiatan BID. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, tingkat kepuasan peserta dalam kegiatan BID di cluster VI secara garis besar desa yang hadir sudah menilai cukup puas. Semua kegiatan secara keseluruhan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta jika dilihat dari respon peserta yang hadir, nilai positifnya lebih banyak dari pada nilai negatifnya. Karena yang hadir dari banyak desa tentu tanggapan mereka berbeda beda, beberapa desa menanggapi dengan baik kegiatan BID seperti yang disampaikan peserta dari Desa Jipo Bapak Syahudi bahwa, sudah cukup puas dengan kegiatan yang disiapkan oleh panitia pelaksana, penilaianya adalah 9 (sembilan) bintang dari 10 (sepuluh) bintang penilaian. Disisi lain peserta dari Desa Sidorejo Bapak Antok menyampaikan hal yang berbeda mengenai kepuasan, bahwa masih kurang puas dengan kegiatan BID karena memang kurang terarah dan kurang jelas, penilaian yang diberikan adalah 3 (tiga) bintang penilaian.

Selain itu dari Desa Sidomukti Bapak Abdul Aziz menyampaiakan cukup puas dengan memberikan penilaian 7 (tujuh) bintang penilaian. Dengan demikian dalam hal kepuasan pelaksanaan BID sudah menunjukan kepuasan vang cukup dari peserta namun memang masih ada beberapa desa yang memberikan penilaian rendah terkait kepuasan selama kegiatan. Jika dilihat dari panitia pelaksana juga mererka menyampaikan sudah cukup puas dengan kegiatan yang sudah terlaksana karena sudah sesuai rencana. Namun terkait kesejahteraan TPID sebagai tenaga pelaksana mengeluhkan masih kurang puas, wajar memang anggota TPID juga mengharapkan kesejahteraan lebih baik karena memang pekerjaan yang dilakukan cukup menguras tenaga dan pikiran. Secara tidak langsung sebenarnya hal tersebut juga mempengaruhi kinerja TPID sebagai panitia pelaksana BID, sehingga kegiatan masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan masih menimbulkan ketidakpuasan peserta terhadap pelaksanaan BID.

8. Internalisasi Tujuan Organisasi

Internalisasi berasal dari kata (*internalization*) merupakan suatu proses memasukkan nilai atau memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dipahami sebagai sesuatu diluar diri, agar tergabung dalam pemikiran, keterampilan dan sikap pandang hidup seseorang (Fadhli, 2018:124). Lebih rinci internalisasi kaitanya dengan tujuan organisasi, merupakan diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit dalam organisasi serta keyakinan bahwa tujuan organisasi adalah benar dan layak (Campbell dalam Sutrisno,

2007:131-133). Semakin tujuan organisasi itu dibenarkan dan diyakini menunjukan bahwa program itu menjadi sebuah hal yang sesuai untuk dilakukan.

Dari hasil wawancara yang diperolleh peneliti, dapat diketahui terkait internalisasi tujuan organisasi sudah terbangun baik dari peserta maupun pelaksana kegiatan BID yaitu TPID dengan dibantu pendamping desa. Dari segi peserta, mereka menanggapi pelaksanaan BID memang sangatlah diperlukan asalkan dilakukan dengan baik dan serius, karena melalui kegiatan BID ini bisa membuka wawasan desa dalam hal inovasi desa. Mereka juga satu suara merespon dengan adanya BID ini membuat desa-desa semakin termotivasi untuk menggali potensi desa yang ada. Dengan adanya kartu komitmen sebenarnya bisa menjadi langkah awal desa untuk memulai ber inovasi apabila sudah menemukan inovasi yang sesuai dari menu inovasi yang ditampilkan. Dalam hal kelanjutan program juga setiap desa memiliki respon yang sama yaitu, sebaiknya pelaksanaan BID bisa tetap berlanjut setiap tahunya karena memang bisa menjadi fasilitas yang baik untuk mengembangkan inovasi desa serta memaksimalkan potensi desa yang belum tergali.

Selain itu temuan dari wawancara peneliti dengan pihak pelaksan BID *cluster* VI juga menyampaikan bahwa, kegiatan BID menjadi kegiatan yang sangat penting karena jika dilakukan dengan maksimal tentu akan membuat perkembangan yang baik dalam mendorong munculnya inovasi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan desa itu sendiri. Dengan demikian, perihal internalisasi tujuan organisasi dari BID sudah terbina dengan baik khususnya di *cluster* VI walaupun memang masih ada beberapa aspek dalam BID yang belum terlaksana dengan maksimal.

9. Konflik Kohesi

Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) dimensi kutub kohesi, yang menunjukan satu sama lain saling suka, kerjasama, berkomunikasi penuh dan terbuka, dan terkoordinasikan dalam kegiatan. Sedangkan dimensi kutub konflik, yaitu perselisihan dalam bentuk kata kata, fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif. Ukuran bagaimana kerjasama berjalan dan konflik bisa teratasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan BID. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan, maka kesalahankesalahan yang akan terjadi sangat kecil (Tinggogoy dkk, 2018:46). Dengan demikian, komunikasi atau koordinasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program atau kebijakan (Amirudin, 2018:27).

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, perihal koordinasi dan komunikasi pada pelaksanaan BID di Kabupaten Bojonegoro secara luas melalui beberapa tahapan. Mulai dari tingkat kabupaten dilaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder tingkat kabupaten untuk menyepakati penjadwalan BID di Bojonegoro dalam tingkat claster juga tentunya. Kemudian menindaklanjuti kepada TPID dan pendamping desa memberikan pembekalan teknis dan nonteknis tentang pelaksanaan BID. Dilakukan koordinasi juga dengan pihak kecamatan untuk persiapan lebih teknisnya, untuk undangan ke desa

juga dikoordinasikan dengan mengetahui langsung camat setempat agar peserta bisa maksimal, ada juga sosialisasi ke masing masing desa serta pendistribusian menu inovasi. Untuk komunikasi dan koordinasi. Dalam lingkup pelaksana TPID juga selalu mengadakan koordinasi dan komunikasi baik secara online melalui grup serta offline dengan mengadakan rapat koordinasi TPID. Penanganan teknis ke masing masing desa oleh TPID diserahkan kepada pendamping desa dan pihak kecamatan setempat, karena TPID memiliki tugas pokok hanya sebagai pengkoordinir pelaksanaan BID dan *capturing*. Namun dari pihak TPID juga masih bekerjasama dengan pendamping desa dalam melakukan sosialisasi kepada masing masing desa tidak sepenuhnya lepas tangan diserahkan kepada pendamping desa.

Meskipun tahapan dan garis koordinasi sudah dibuat sedemikian rupa namun dalam pelaksanaanya juga masih mengalami kendala khususnya di salah satu kecamatan di cluster VI Kecamatan Kedungadem, seperti perihal akses kemasing masing desa dan komunikasi antara pendamping desa dan pihak desa setempat juga menjadi kendala yang berpengaruh langsung terhadap tingkap partisipasi dan banyaknya kartu komitmen yang terjaring selama kegisatan BID, salah satunya adalah Desa Sidomulyo sebagai salah satu desa yang tidak hadir menyampaikan bahwa memang tidak menerima informasi sama sekali mengenai kegiatan BID baik dari TPID maupun pendmaping desa setempat. Hal tersebut juga terjadi kaerena kurangnya komunikasi pihak desa dengan pihak TPID dan pendamping desa setempat. Selain itu pendistribusian menu inovasi sebelum kegiatan BID juga belum merata, mengingat beberapa desa yang menjadi responden dalam penelitianan ini mereka menyampaikan tidak menerima menu inovasi tersebut sebelum kegiatan

Dalam pelaksanaan BID walaupun beberapa peserta merespon dengan baik selama kegiatan, beberapa peserta juga mengeluhkan tentang bagaimana jalanya acara BID masih kurang terarah dan konsultasi belum berjalan dengan maksimal karena keadaan acara yang terkesan semerawut. Bahkan salah satu peserta dari Desa Sidorejo mengeluhkan pertanyaan pertanyaan mengenai inovasi direspon oleh panitia kurang baik seakan kurang begitu mengerti perihal poin-poin dari menu inovasi yang ditampilkan. Dari temuan tersebut bisa disimpulkan bahwa kaitanya dengan konflik kohesi dalam pelaksanaan BID sistem koordinasi sudah dipersiapkan dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya terbilang masih kurang, karena dalam hal koordinasi diluar acara masih ditemui kendala khususnya komunikasi mengenai kegiatan BID dan proses sosialisasi yang belum maksimal. Dalam jalanya acara sebagai kegiatan inti dari BID juga masih ditemui kendala terkait mobilisasi peserta dan komunikasi ketika sesi konsultasi menu inovasi.

10. Fleksibilitas Adaptasi

Fleksibilitas adaptasi merupakan tingkat kemampuan sebuah program atau kegiatan dalam menanggapi tantangan lingkungan, menyesuaikan dengan lingkungannya sebagai bentuk kesiapan program dengan berbagai respon lingkungan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Campbell dalam Sutrisno, 2007:131-

133). Dalam lingkungan pekerjaan yang dinamis, beberapa tugas semakin sering dikerjakan dalam tim, sehingga fleksibilitas sangatlah penting (Henry dalam Sulistyawati, 2018:698). Pelaksanaan BID memang mencakup wilayah yang luas dan terkait kondisi dan karakteristik masingmasing desa menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Pada tahun 2019 di Bojonegoro, BID dilaksanakan dengan sistem *cluster* yang membagi pelaksanaanya menjadi 7 (tujuh) *cluster*. Tentu hal ini dilakukan agar BID bisa menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa di *cluster* tersebut dan juga agar penanganan dalam proses pelaksanaan BID bisa tertangani lebih baik.

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, cluster menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan pada BID tahun 2018 yang dilakukan secara terpusat dimana keadaan menjadi sulit dikendalikan dan penanganan yang sulit. Meskipun demikian, tanggapan dari beberapa desa masih menilai dalam pelaksanaan BID masih kurang bisa berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan desa yang tidak hadir dalam BID cluster VI Desa Sidomulyo, bahwa dalam hal sosialisasi dan komunikasi misalnya masih belum merata. Komunikasi pendamping desa mengenai kegiatan BID ini juga terbilang sangat kurang sehingga beberapa desa termasuk Desa Sidomulyo tidak memperoleh undangan atau informasi mengenai kegiatan BID ini. Dalam kaitanya dengan partisipasi seharusnya memang dengan sistem cluster ini bisa lebih baik dalam proses koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi. Namun masih ditemui kendala, khususnya disalah satu kecamatan cluster VI Kecamatan Kedungadem.

Dari segi proses pelaksanaan dan kelengkapan menu inovasi pada pelaksanaan BID 2019 khususnya cluster VI secara garis besar sudah berjalan baik dan sesuai dengan arahan Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Misalnya terkait tahapan pelaksanaan diantaranya dimulai dari pra BID yaitu sosialisasi langsung ke desa-desa. Kemudian opsi pelaksanaan BID dengan menekankan kunjungan menu inovasi sebelum kegiatan dimulai sekaligus penjaringan kartu komitmen, dan opsi penjaringan kartu komitmen setelah acara. Semua opsi kegiatan tersebut semua dijalankan, walaupun masih ada beberapa kendala yang terjadi ketika eksekusi proses tersebut. Dalam kelengkapan inovasi juga misalnya ada beberapa desa yang tidak berkomitmen menyampaikan terkait menu inovasi sudah beraneka ragam namun masih belum menemukan inovasi yang cocok dan sesuai dengan keadaan desa, hel tersebut disampaikan oleh perwakilan peserta dari Desa

Dengan demikian, dalam fleksibilitas pelaksanaan BID masih berjalan kurang baik. Karena walaupun dengan sistem *cluster* diharapkan agar BID bisa menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa di *cluster* tersebut dan juga agar penanganan dalam proses pelaksanaan BID bisa tertangani lebih baik. Namun dalam hal sosialisasi dan komunikasi misalnya masih belum merata. Pelaksanaan BID melibatkan banyak stakeholder khususnya TPID sebagai pelaksana di tingkat kecamatan serta sebagai pengkoordinir dibantu oleh pendamping desa yang berkoordinasi secara intensif dengan desa, sehingga

desa bisa berpartisipasi secara maksimal. Gerakan pendamping desa dalam berkoordinasi dengan pihak desa menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan BID ini disamping itu dalam proses konsultasi dan komunikasi antara desa dan pendamping desa juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem memang dinilai masih kurang, selain akses lokasi juga komunikasi antara TPID, pendamping desa, dan pihak desa mengenai pelaksanaan BID masih kurang, dapat dilihat dari tingkat partisipasi desa dan tanggapan beberapa desa yang tidak berpartisipasi. Selain itu, dari segi proses pelaksanaan dan kelengkapan menu inovasi pada pelaksanaan BID 2019 khususnya *cluster* VI secara garis besar sudah berjalan baik dan sesuai dengan arahan Tim Inovasi Kabupaten (TIK).

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil anlisis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa *Cluster* VI Tahun 2019) diatas, dapat dilakukan penarikan beberapa kesimpulan berdasarkan temuan serta data yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

Indikator kualitas, pada pelaksanaan BID khususnya di *cluster* VI kualitas dari produk utama yg ditampilkan berupa menu inovasi sudah cukup baik. Meskipun sudah cukup baik dari segi kualitas menu inovasinya, memang masih ada beberapa desa yang tidak berkomitmen.

Indikator produktivitas, Tingkat produktivitas dari menu inovasi sudah tersedia dengan baik. Media yang ditampilkan juga sudah disesuaikan dengan penataan bilikbilik dan penampilan menu inovasi dengan media pendukung seperti poster/pamflet, banner, video. Namun dari segi produktivitas kartu komitmen bisa dikatakan masih kurang/rendah.

Indikator kesiapsiagaan, Dalam proses persiapan BID yaitu pra BID dengan tahapan sosialisasi dan pendistribusian menu inovasi belum maksimal dijalankan, Dari segi proses pelaksanaan BID, penyampaian menu inovasi yang di sediakan belum tersampaiakan dengan baik. Dalam penanganan peserta selama kegiatan terutama dalam sesi mengunjungi bilik menu inovasi dan konsultasi menu inovasi, beberapa desa masih menilai kurang baik. Selain itu masih belum adanya seksi/unit khusus yang fokus mengatur jalanya acara juga menjadi faktor jalanya acara menjadi kurang lancar.

Indikator efisiensi, Dari segi peserta kegiatan BID sudah cukup efisien dilaksanakan walaupun mungkin masih ada kekurangan. Sedangkan dari segi pelaksana kaitanya dengan pengelolaan anggaran masih ditemui beberapa kendala, seperti perihal tunjangan kesejahteraan/honor TPID dan juga tentang pemangkasan anggaran lainya. Dengan demikian dalam hal efisiensi dari segi peserta dan pelaksana BID masih kurang efisien.

Indikator pertumbuhan, dalam persiapan dan sistem sudah mengalami peningkatan yang baik. Namun dalam hal hasil berupa tingkat partisipasi dan jumlah kartu komitmen belum nenunjukan perkembangan yang signifikan.

Indikator Motivasi, Secara garis besar pesrta yang hadir sudah termotivasi namun hasil tersebut dirasa masih kurang masksimal, jika dilihat dari tanggapan beberapa peserta yang tidak mengisi kartu komitmen mengeluhkan juga perihal proses jalanya acara yang kurang terarah, sehingga konsultasi dan komunikasi belum terlaksana dengan baik. Secara otomatis hal tersebut mempengaruhi motivasi peserta dalam memilih menu inovasi yang ditampilkan.

Indikator kepuasan, dalam hal kepuasan pelaksanaan BID sudah menunjukan kepuasan yang cukup dari peserta namun memang masih ada beberapa desa yang memberikan penilaian rendah terkait kepuasan selama kegiatan. Terkait honor kesejahteraan TPID sebagai tenaga pelaksana mengeluhkan masih kurang puas.

Indikator internalisasi tujuan organisasi, perihal internalisasi tujuan organisasi dari BID sudah terbina dengan baik khususnya di *cluster* VI walaupun memang masih ada beberapa aspek dalam BID yang belum terlaksana dengan maksimal.

Indikator konflik kohesi, dalam pelaksanaan BID sistem koordinasi sudah dipersiapkan dengan baik namun dalam pelaksanaanya terbilang masih kurang karena dalam hal koordinasi diluar acara masih ditemui kendala khususnya komunikasi mengenai kegiatan BID dan proses sosialisasi yang belum maksimal. Dalam jalanya acara juga masih ditemui kendala terkait mobilisasi peserta dan komunikasi ketika sesi konsultasi menu inovasi.

Indikator fleksibilitas adaptasi, dalam fleksibilitas pelaksanaan BID kaitanya dengan sistem pelaksanaan secara *cluster* masih berjalan kurang baik. Jika dilihat dari segi proses pelaksanaan dan kelengkapan menu inovasi pada pelaksanaan BID 2019 khususnya *cluster* VI secara garis besar sudah berjalan baik dan sesuai dengan arahan Tim Inovasi Kabupaten (TIK).

Berdasarkan uraian tersebut menunjukan Dari 10 (sepuluh) indikator penilaian efektivitas, hanya indikator kualitas dan internalisasi tujuan organisasi menunjukan penilaian cukup baik. Penilaian pada indikator lainya menunjukan hasil yang masih kurang baik. Secara umum kendala yang ditemukan dari analisis hasil penelitian adalah proses sosialisasi, komunikasi dan koordinasi antar aktor yang terlibat seperti TPID, pendamping desa, dan pihak desa berjalan dengan kurang maksimal. Selain itu kendala teknis yang muncul selama kegiatan berjalan seperti pada mobilisasi peserta dan kesiapsiagaan panitia pelaksana, juga dinilai menjadi hal yang mempengaruhi output selama kegiatan menjadi kurang maksimal. Dari segi internal pelaksana yang kaitanya dengan honor kesejahteraan untuk anggota TPID juga menjadi kendala tersendiri yang secara manusiawi mempengaruhi kinerja selama penyelenggaraan kegiatan BID.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa *Cluster* VI Tahun 2019) peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, agar pelaksanaan BID bisa berjalan lebih efektif, yaitu:

- Perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi secara lebih merata kepada desa-desa, segala instrumen dalam sosialisasi benar-benar harus dikomunikasikan, misalnya pendistribusian menu inovasi sebelum kegiatan BID seharusnya bisa tersalurkan dengan maksimal.
- 2. Mempererat koordinasi dan komunikasi antara pendamping desa dan pihak desa setempat, baik formal maupun non formal mengenai pelaksanaan BID
- 3. TPID kecamatan menjalin komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan pendamping desa, sebagai langkah follow up perkembangan persiapan BID oleh pihak desa.
- Memperbaiki alur konsultasi menu inovasi untuk mengatasi keramaian peserta, misalnya dengan menyediakan lebih banyak bilik tampilan menu inovasi.
- 5. Penambahan seksi/unit acara dan koordinator lapangan dalam kepengurusan BID *cluster* VI.
- 6. Penambahan media bursa seperti poster/pamflet serta memastikan setiap desa mendapatkan media bursa tersebut.
- 7. Penambahan honor kesejahteran khusus kepada anggota TPID diluar anggaran oprasional yang tersedia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini peneliti banyak menemui hambatan dan tantangan. Dengan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, semua hambatan dan tantangan bisa teratasi. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, diantaranya:

- Ibu dan kakak serta segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, serta menjadi motivasi terbesar peneliti untuk terus maju meraih setiap pencapaian.
- 2. Orang yang selalu mendampingi diberbagai keadaan, memberikan semangat, dan dukungan, serta menjadi salah satu impian besar peneliti yang harus diperjuangkan, Nungki Putri Ana Dewi.
- 3. Bapak Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan semangat.
- 4. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. dan Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., M.PA selaku dosen penguji.
- Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa yang senantiasa hadir memeberikan wawasan dan pengetahuan.
- 6. Bapak Fatkur Selaku PIC BID Kabupaten Bojonegoro.
- Bapak Yahya selaku ketua pelaksana BID Cluster VI dan Bapak Farid selaku Ketua TPID Kecamatan Kedungadem serta narasumber lainya yang sudah bersedia membantu peneliti selama penelitian berlangsung

8. Teman-teman jurusan Administrasi Publik terbaik yang selalu membantu, menemani, saling mendukung dan menyemangati baik selama proses penyusunan artikel ilmiah maupun selama masa perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, M. Fachri Adnan, And Adil Mubarak. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman." *Journal Of Public Sector Innovations* 2(1): 1–9. (https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2360/1500, diunduh pada 22 Juli 2020)
- Amirudin, Akhmad. 2018. "Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu." *Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations)* 2(1): 26. (https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2363/1503, diunduh pada 19 Juli 2020)
- Asep, Nuwanda, And Badriah Elis. 2020. "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7: 59–66. (https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/artic le/view/3313, diunduh pada 11 Juni 2020)
- Dana, Efektivitas Et Al. 2019. "Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara." Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara 19(02): 131–40. (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25008, diunduh pada 20 Juni 2020)
- Fadhli, Muhammad. 2018. "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10(2): 116–27. (http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/169, diunduh pada 23 Juni 2020)
- Firdaus, Helmi Nur, And Fitrotun Niswah. 2018. "Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Helmi Nur Firdaus Abstrak." *Jurnal Mahasiswa Unesa*: 7. (https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/28495, diunduh pada 11 Juni 2020)
- Firdiyanti, Erwin. 2017. "Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." 5: 1–7. (https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/22160, diunduh pada 23 Juni 2020)
- Haque, Md, Angela Titiamayah, And Lu Liu. 2016.

- "Leadership & Organization Development Journal The Role Of Vision In Organizational Readiness For Change And Growth For Authors The Role Of Vision In Readiness For Change." *Leadership & Organization Development Journal* 37. (Http://Dx.Doi.Org/10.1108/Lodj-01-2015-0003, diunduh pada 24 juli 2020)
- Haryanto, Resty Avita. 2013. "Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Restoran Mcdonald's Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(4): 1465–73. (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article /view/2923, diunduh pada 11 Juni 2020)
- Henriyani, Etih. 2019. "Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan." *Fisip Universitas Galuh Ciamis*. (https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/artic le/view/1750, diunduh pada 11 Juni 2020)
- Jabagi, Nura, Anne Marie Croteau, Luc K. Audebrand, And Josianne Marsan. 2019. "Gig-Workers' Motivation: Thinking Beyond Carrots And Sticks." *Journal Of Managerial Psychology* 34(4): 192–213. (https://doi.org/10.1108/JMP-06-2018-0255, diunduh pada 24 Juli 2020)
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. "Berapa Realisasi Dana Desa Hingga Agustus 2019." Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/ 09/27/Berapa-Realisasi-Dana-Desa-Hingga-Agustus-2019 (diakses pada 4 Desember 2019).
- Kurbani, Adie. 2017. "Pengaruh Kualitas Layanan Akademik Dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Kuliah Pada Universitas Pgri Palembang." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 13(4): 23. (https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view /2701, diunduh pada 23 Juni 2020)
- Matuszak-Flejszman, Alina, And Beata Szyszka. 2019. "E Ff Ectiveness Of Emas: A Case Study Of Polish Organisations Registered Under Emas." 74(November 2018): 86–94.
- Maulana, Muhamad Fajar, Nawangsih, And Riza Bahtiar Sulistyan. 2019. "Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Karti Perdama Im3." *Jurnal Riset Manajemen* 2(1): 78–88. (http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jrm/article/view/122, diunduh pada 20 Juni 2020)
- Miles, Matthew B, And Michael A. Huberman. 2012. "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru." *Universitas Indonesia_Ui Press*.

- Paat, Harry P., Grace B. Nangoi, And Rudy J. Pusung. 2019. "Effectiveness And Efficiency Analysis For The Budgeting Implementation In." 7(3): 2979–88. (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24044, diunduh pada 24 Juni 2020)
- Sulistyawati, Ni Luh Ketut Sri. 2018. "Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan Hotel Berbintang Di Bali." *National Conference Of Creative Industry* (36): 697–704.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tinggogoy, Filo Leonardo. 2018. "Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu.": 43–49. (http://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/9, diunduh pada 23 juni 2020)
- Ula, N Mas, I Putu Siartha, And I Putu Ananda Citra. 2019. "Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng." 7(3): 103–12. (https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/arti cle/view/21508, diunduh pada 24 Juni 2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Keputusan Mentri Desa PDTT Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kepmendesa PDTT No. 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- Petunjuk Teknis Oprasional PID 2019.
- Panduan Teknis Bursa Inovasi Desa-Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019